

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Provinsi Jambi memiliki sumberdaya perikanan yang beragam dengan jumlah produksi perikanan laut di Provinsi Jambi sebesar 43.474,1.ton pada tahun 2015, akan tetapi jumlah produksi perikanan laut Provinsi Jambi masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi tetangganya yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Jambi memiliki komoditi perikanan berupa udang ketak yang sudah menembus pasar luar negeri. Jumlah nelayan di Provinsi jambi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 22,8 %. Armada penangkapan yang digunakan nelayan provinsi jambi didominasi oleh kapal motor < 5 GT sebanyak 2.265 unit pada tahun 2015. Alat penangkapan ikan yang ada di Provinsi jambi dibagi menjadi 7 kelompok yaitu : pukat kantong, jaring insang, pancing, perangkap, alat pengumpul kerang, alat pengumpul kepiting dan alat tangkap lainnya seperti tombak dan jala. Jaring insang hanyut merupakan jenis alat tangkap yang paling banyak digunakan yaitu 1.282 unit pada tahun 2015.
2. Nilai tukar nelayan Provinsi Jambi pada periode 2013 sampai 2016 secara umum mengalami peningkatan dengan pola perkembangan hampir sama dengan pola perkembangan Nilai tukar Nelayan Nasional. Akan tetapi NTN Provinsi Jambi selalu berada dibawah angka NTN Nasional. Bila dibandingkan dengan dua provinsi tetangga yaitu provinsi Riau dan Provinsi

Sumatera barat, NTN Provinsi Riau merupakan yang terbesar dan selalu berada diatas angka NTN nasional, sedangkan angka NTN Provinsi Sumatera barat lebih rendah dari angka NTN Provinsi Jambi.

3. Kondisi lingkungan internal dan eksternal peningkatan kesejahteraan nelayan di pesisir Provinsi Jambi yaitu :
- a) Kekuatan sebagai berikut : Pemahaman yang tinggi tentang cara melaut dan kondisi perairan, potensi sumber daya manusia yang besar serta tingginya minat masyarakat untuk berprofesi sebagai nelayan, tingginya tingkat homogenitas masyarakat terutama suku dan agama, banyaknya waktu luang yang dimiliki oleh istri nelayan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan keluarga serta besarnya dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan ;
 - b) Kelemahan sebagai berikut : rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Provinsi Jambi, masih menggunakan armada penangkapan dan alat tangkap yang tradisional, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha, pola dan kebiasaan hidup masyarakat nelayan yang salah, sifat nelayan yang menunggu bantuan pemerintah (bermental pengemis), masih bergantung kepada toke / tengkulak, sulitnya proses perizinan kapal dengan ukuran GT yang besar, masih menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah;
 - c) Peluang sebagai berikut : peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan program prioritas pemerintah pusat, memiliki komoditi udang ketak yang bernilai tinggi, sarana dan prasarana perikanan yang cukup memadai, memiliki ekosistem mangrove yang cukup luas, laju perkembangan harga ikan yang tinggi ;
 - d) ancaman sebagai berikut : Overfishing, kondisi iklim dan

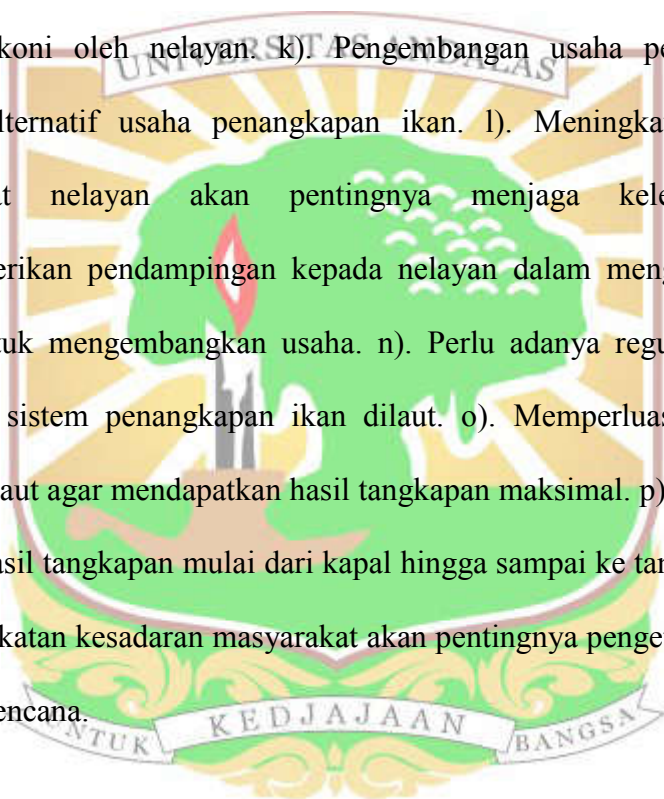
cuaca yang tidak dapat diprediksi, adanya pasokan komoditi perikanan dari daerah lain yang masuk ke pasar lokal dan akses pasar yang terbatas

4. Arah kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Provinsi Jambi sebagai berikut :
- a). Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terampil dalam usaha penangkapan ikan di laut agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada.
 - b). Peningkatan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan masyarakat nelayan yang sejahtera.
 - c). Penguatan modal usaha bagi nelayan agar dapat memperbaharui teknologi dalam penangkapan ikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
 - d). Mewujudkan masyarakat nelayan yang berwawasan lingkungan agar dapat mengelola sumber daya laut secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - e). Mendorong terciptanya peluang usaha alternatif bagi nelayan agar dapat meningkatkan penghasilan keluarga.
 - f). Penegakan hukum dan peraturan mengenai penangkapan ikan di laut agar terwujudnya keselarasan dalam pemanfaatan dengan kelestarian sumber daya alam.

Strategi prioritas peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir provinsi Jambi adalah :

- a). Meningkatkan kerjasama lintas sektoral untuk menanggulangi kemiskinan nelayan.
- b). Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan agar dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
- c). Memperbanyak kelembagaan di masyarakat nelayan untuk mempermudah dalam proses transfer ilmu dan teknologi baru.
- d). Memperkuat armada penangkapan serta memperbaharui teknologi dalam menangkap ikan.
- f). Menjaga sarana dan prasarana yang ada serta menjaga kelestarian sumber

daya perikanan agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. g). Memberikan pelayanan yang mudah bagi nelayan dalam mengembangkan usaha. h).Memperkuat sistem kekeluargaan pada masyarakat nelayan agar dapat saling bahu membahu dalam mengatasi permasalahan yang ada. i). Penegakan hukum dan sanksi yang jelas bagi nelayan yang melanggar hukum demi menjaga kelestarian sumber daya alam. j). Memanfaatkan program dan kegiatan yang telah di buat oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha yang dilakoni oleh nelayan. k). Pengembangan usaha pengolahan ikan sebagai alternatif usaha penangkapan ikan. l). Meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan akan pentingnya menjaga kelestarian alam. m).Memberikan pendampingan kepada nelayan dalam mengurus pinjaman modal untuk mengembangkan usaha. n). Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai sistem penangkapan ikan dilaut. o). Memperluas jarak tempuh dalam melaut agar mendapatkan hasil tangkapan maksimal. p). Meningkatkan kualitas hasil tangkapan mulai dari kapal hingga sampai ke tangan konsumen. q). Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai mitigasi bencana.



1.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah ditulis dapat ditarik beberapa saran untuk Pemerintah maupun masyarakat nelayan untuk peningkatan kesejahteraan Nelayan di wilayah pesisir Provinsi Jambi, yaitu :

1. Perlu adanya konsistensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir provinsi jambi. Konsistensi tersebut dapat diwujudkan

dalam bentuk kontinuitas penyediaan anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir.

2. Masih terdapat banyak kekurangan dalam menghitung tingkat kesejahteraan nelayan dengan menggunakan indikator indeks Nilai Tukar Nelayan, sehingga pemerintah perlu membuat indikator yang lebih sempurna untuk menghitung tingkat kesejahteraan nelayan.
3. Pemerintah harus bisa meminimalisir kelemahan serta ancaman dalam peningkatan kesejahteraan nelayan serta harus mengembangkan kekuatan dan peluang yang ada.
4. Perlunya keseriusan semua pihak untuk menjalankan strategi dan kebijakan yang telah disusun baik dari pemerintah, masyarakat nelayan serta lembaga-lembaga swadaya yang ada.

